

SCRATCHING AKULTURASI BUDAYA DI PEDESAAN ACEH SINGKILAkmal Saputra¹⁾ *, Triyanto²⁾, Irma Juraida³⁾, Khairan⁴⁾, Lilis Sariyanti⁵⁾, Cut Irna Liyana⁶⁾^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, Meulaboh - Indonesia*Corresponding Author : akmalsaputra@utu.ac.id**ABSTRACT**

This study aims to examine the cultural acculturation that occurs among the communities in Aceh Singkil following the 2015 religious conflict. The research seeks to discover new concepts, particularly the local values of the Aceh Singkil community, to address and resolve the religious conflicts that occurred. Mead's symbolic interactionism theory serves as an analytical tool to understand actions (cultural acculturation) within the interaction process among actors in their efforts to influence one another. The study employs a qualitative method to identify factors that contribute to harmonious coexistence among the pluralistic communities in Singkil, encompassing cultural, religious, and ethnic diversity in Aceh Singkil. The findings reveal several factors causing strained relationships among community members and between religious groups in Suka Makmur, Aceh Singkil, including the establishment of places of worship without proper permits. The lack of permits led to protests and demands for regulation enforcement by certain parties. Nevertheless, other factors were found to support the unity of the pluralistic society in Suka Makmur, Aceh Singkil. These include mutual respect and appreciation, as well as the occurrence of cross-cutting affiliations among community members.

Keywords: Acculturation, Conflict, Local Values

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan melihat akulturasi yang terjadi antar budaya masyarakat di Aceh Singkil pasca konflik agama tahun 2015. Penelitian ini ingin menemukan konsep baru terutama nilai-nilai lokal masyarakat Aceh Singkil sehingga konflik agama yang terjadi dapat diatasi. Teori interaksional simbolik dari Mead menjadi pisau analisis dalam melihat tindakan (akulturasi budaya) pada proses interaksi antar aktor dalam upaya saling mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mampu membuat kehidupan masyarakat Singkil yang harmonis dengan segala pluralisme yang ada pada masyarakat Aceh Singkil baik dari segi budaya, agama dan etnik. Hasil penelitian ini menemukan beberapa faktor yang menyebabkan tergoresnya hubungan antar warga masyarakat dan antar umat beragama di Suka Makmur Aceh Singkil adalah pendirian tempat ibadah yang tidak mendapatkan ijin. Pendirian tempat ibadah yang tidak mendapatkan ijin membuat pihak sebelah protes dan meminta dilakukan penertiban. Namun, terdapat faktor-faktor lainnya yang membuat masyarakat Suka Makmur Aceh Singkil yang plural mampu bersatu adalah karena saling menghargai dan menghormati serta terjadinya cross cutting affiliation sebagai warga masyarakat.

Kata Kunci: Akulturasi, Konflik, Nilai Lokal

PENDAHULUAN

Aceh Singkil merupakan salah satu kabupaten yang memiliki tingkat keberagaman masyarakat yang cukup tinggi, baik agama, suku dan juga budaya, Aceh Singkil salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan provinsi Sumatera Utara, sehingga akses masyarakat dari Provinsi Sumatera Utara lebih mudah untuk menjangkau Aceh Singkil hingga menetap dan menjadi bagian dari penduduk Aceh Singkil, begitu juga sebaliknya. Tingkat keberagaman itu kemudian menjadikan Aceh singkil hidup dalam keberagaman suku, agama dan budaya. Keberagaman ini mengantarkan masyarakat Aceh Singkil pada akulturasi kebudayaan sehingga seringkali bersinggungan antara budaya yang berbeda hingga klimaknya terjadinya konflik antar pemeluk agama.

Singkil menjadi bidikan penting pasca konflik agama ditahun 2015 yang silam, konflik agama seolah membawa Aceh Singkil pada daerah yang dianggap intoleran, padahal sebelumnya mereka dapat hidup secara berdampingan tanpa ada disintegrasi atau konflik (Fasya et al., 2023; Setiawati, 2023). Konflik agama di Indonesia bukanlah sesuatu hal yang baru, konflik agama dapat terjadi antar agama, antar sekte dan antar aliran (Hanafi, 2018). Konflik agama di Indonesia dapat dilacak, misalnya konflik di Poso, konflik di Ambon dan beberapa konflik lainnya hingga konflik agama di Aceh Singkil.

Kajian-kajian tentang akulturasi antar budaya pasca konflik bukanlah kajian yang baru, akulturasi antar budaya menjadi penting agar konflik agama, etnis dan sebagainya dapat dihindarkan atau diminimalkan, membangun komunikasi antar kelompok melalui akulturasi kebudayaan lokal sebagai langkah untuk meminimalisir konflik, disamping peran sekaligus keterlibatan struktur negara dalam meminimalkan terjadinya konflik (Subekti, 2019; Trijono, 2009) selain itu juga kajian tentang pentingnya pendekatan budaya sebagai salah satu resolusi konflik (Istiqomah & Widiyanto, 2020), kegagalan akulturasi budaya justru menjadi akar masalah dalam setiap konflik (Humaedi, 2014).

Membaca Aceh Singkil tentu harus dilihat bahwa ada proses migrasi penduduk dari Sumatera Utara yang sebagiannya beragama Kristen dan Katolik, sehingga terjadinya percampuran budaya secara alamiah, migrasi ini tentu akan berdampak terhadap situasi masyarakat setempat dan juga penyesuaian sosial (Armansyah et al., 2022). Konflik Agama di Aceh Singkil pada dasarnya tidak hanya persoalan budaya yang berbeda, namun justru terjadi karena abai terhadap konsensus yang telah ditetapkan. Konflik agama di Singkil terjadi atas kekecewaan umat Islam terhadap

masyarakat yang beragama Kristen yang dianggap telah melanggar perjanjian pendirian rumah ibadah (Hartani & Nulhaqim, 2020). Oleh sebab itu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mampu membuat kehidupan masyarakat Singkil yang sangat harmonis itu dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mampu membuat masyarakat Singkil yang plural ini bersatu dan hidup rukun sangat penting di lakukan.

Berangkat dari keberagaman, konflik hingga reintegrasi masyarakat Aceh Singkil, tim peneliti mencoba untuk menelusuri secara mendalam mengapa dan bagaimana akulturasi antar budaya yang berbeda dapat diwujudkan kembali pasca konflik antar agama. Penelitian ini ingin menggali nilai-nilai lokal apa yang dibawa oleh masyarakat sehingga akulturasi kebudayaan antar masyarakat di Aceh Singkil dapat terjadi kembali pasca konflik. Penelitian ini akan menjadi temuan penting tentang bagaimana masyarakat Aceh Singkil dapat mewujudkan kembali akulturasi antar budaya di Aceh Singkil, nilai-nilai lokal apa yang dibawa masyarakat Aceh Singkil pasca konflik. Konflik antar masyarakat seringkali terjadi pada masyarakat yang memiliki tingkat keberagaman yang cukup tinggi, baik konflik agama maupun konflik antar budaya yang berbeda atau konflik antar suku.

TINJAUAN PUSTAKA

Akulturasi budaya pada sekelompok masyarakat sangat penting. Hal ini dapat dipastikan bahwa tatanan sekelompok masyarakat dapat hidup bersama dan harmonis. Akulturasi budaya juga dapat menurunkan eskalasi Konflik dalam masyarakat. Koentjaraningrat (1975), menyebutkan bahwa ada 4 wujud kebudayaan, yaitu: Kebudayaan sebagai nilai Ideologi; kebudayaan sebagai sistem gagasan; kebudayaan sebagai sistem tingkah laku dan tindakan yang berpola; dan kebudayaan sebagai benda Fisik (Artefak). Jejak akulturasi Budaya dapat ditelusuri berdasarkan keempat kelompok wujud tersebut.

Mead dalam konsepsinya tentang interaksionisme simbolik mengadopsi teori dari sosiolog klasik Max Weber yang dalam teorinya juga menganalisis tindakan individu. Menurut Mead ada tiga hal yang penting bagi interaksionisme simbolik: (1) memusatkan perhatian pada interaksi antara aktor dan dunia nyata; (2) memandang baik aktor maupun dunia nyata sebagai proses dinamis dan bukan sebagai struktur yang statis, (3) dan arti penting yang dihubungkan kepada kemampuan aktor untuk menafsirkan kehidupan sosial. Menurut Mead manusia mempunyai sejumlah kemungkinan tindakan dalam pemikirannya sebelum ia memulai tindakan (Akulturasi

budaya) yang sebenarnya terlebih dahulu memilih berbagai alternatif tindakan itu secara mental melalui pertimbangan pemikirannya (Ritzer, 2012).

Kerangka penelitian Akulturasi Antar Budaya dalam penelitian ini lebih didasarkan pada pemahaman masyarakat dari hasil pemikiran sosial, sebagaimana dijelaskan dalam karya George Hebert Mead, yaitu *Mind, Self dan Society* dan penafsiran sosial dari Max Weber. *Scratching Akulturasi Antar Budaya* dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai gejala yang subjektif dan objektif. Teori interaksionisme simbolik memusatkan perhatian terutama pada dampak dari makna dan simbol terhadap tindakan dan interaksi manusia (akulturasi budaya). Di sini terlihat pemikiran Mead yang membedakan antara perilaku lahiriah (perilaku karena kebiasaan atau tanggapan tanpa pikir) dan perilaku tersembunyi (proses berpikir yang melibatkan simbol dan arti). Perilaku tersembunyi menjadi sasaran. Sedangkan menurut Johnson, melihat proses ini sebagai proses dari adanya interaksi yaitu, “pemahaman terhadap budaya atau akulturasi kebudayaan tidak terbentuk begitu saja, tetapi melalui proses interaksi secara terus menerus antara faktor eksternal dan internal selama pemahaman tentang budaya tetap berlangsung” (Muttaqin, 2019).

Dengan kerangka analisis di atas dimaksudkan bahwa untuk memperoleh pemahaman masyarakat mengenai akulturasi antar budaya dilakukan observasi- partisipasi dan wawancara mendalam dengan para informan. Pengalaman dan pemahaman mereka berdasarkan pemikiran, konsep diri yang berkembang melalui sosialisasi dalam masyarakat dan proses penafsiran sosial terhadap suatu tindakan dan permasalahan (Akulturasi Antar Budaya) dibutuhkan untuk mendapatkan tingkat pemahaman atau persepsi objektif dan persepsi subjektif. Hal ini disebabkan titik- tolak yang dijadikan patokan Akulturasi adalah pemahaman dari perdenifisian (proses pemikiran) sosial atas keberadaan multikultural yang berkembang dalam pemikiran masyarakat Aceh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan naturalistik, sehingga fenomena sosial dapat dipahami dengan baik (Moleong, 2019). Konflik “agama” yang pernah terjadi berhubungan erat dengan *culture interaction* yang sering terjadi pada masyarakat yang majemuk (Diharjo, 2020) dan multikultural. Hanya dengan pendekatan kualitatif ini maka fenomena yang akhir-akhir ini terjadi dapat diungkap dan dapat dideskripsikan dengan baik sehingga konflik yang akan terjadi dapat diantisipasi dan dapat diminimalisir melalui

pemberdayaan multikulturalisme. purposive sampling, yaitu memilih informan berdasarkan kebutuhan dan kriteria tertentu (Sugiono, 2014). Selaras dengan konsep ini, maka informan diambil dari kriteria 1. Masyarakat di lokasi penelitian, 2. Memahami permasalahan yang diangkat peneliti, 3. Memiliki posisi strategis dalam menyikapi fenomena, dan 4. Memiliki kesadaran untuk menciptakan masyarakat multikulturalis yang aman dan nyaman.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Focus Group Discussion (FGD) untuk mengungkap berbagai peristiwa, isu-isu sosial, fenomena, dan stigma buruk baik individu maupun kelompok. Penggunaan FGD dipandang sangat praktis dan fleksibel (Afiyanti, 2008) sehingga sangat tepat untuk penelitian ini. Diskusi dan tanya jawab berdasarkan interview guide yang sudah disusun peneliti digunakan FGD (kelompok) dan juga untuk wawancara secara individu pada masyarakat Singkil. Selain menggunakan FGD, pengumpulan data juga dilakukan dengan observasi, studi dokumentasi, dan library. Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada pandangan Miles dan Huberman sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono yakni dengan tahapan data reduction, data display, dan conclusion (Sugiono, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Singkil merupakan sebuah kabupaten di ujung barat Selatan Aceh, dengan 120 kampung (desa) (BPSAcehSingkil, 2020), 11 (sebelas) kecamatan dan luas daerah sebesar 1858 Ha2 (BPSAcehSingkil, 2019). Pada tahun 2019, Aceh Singkil memiliki penduduk sejumlah 124.468 jiwa yang tersebar di seluruh kecamatan (BPSAcehSingkil, 2020). Mengenai pekerjaan penduduk, sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan masih mendominasi dengan persentase sebesar 45,96%. Adapun secara rinci mengenai jumlah penduduk bekerja menurut lapangan kerja dapat dilihat dalam tabel 1. berikut ini.

Tabel 1. Data penduduk bekerja berdasarkan lapangan pekerjaan

Lapangan Pekerjaan Utama	Penduduk usia 15 Tahun yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama		
	Laki laki	Perempuan	Jumlah
	2019	2019	2019
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	15 566	3 713	19 279
Pertambangan dan Penggalian	323	0	323

Industri Pengolahan	1 139	1 336	2 475
Listrik, Gas, dan Air Minum	69	0	69
Konstruksi	2 044	0	2 044
Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi	3 136	3 185	6 321
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	1 816	0	1 816
Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	480	79	559
Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	4 516	4 544	9 060
Jumlah	29 089	12 857	41 946

Sumber: *BPS Aceh Singkil 2022*

Komposisi penduduk Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan suku bangsa sangat bervariasi. Meskipun tidak dipungkiri bahwa Singkil sendiri juga merupakan sebuah nama suku yang mendiami wilayah ini. Singkil sebagai nama sebuah suku bangsa juga disebutkan dalam laman Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil yang menyebutkan bahwa penduduk asli kabupaten ini adalah suku Singkil, Aneuk Jamee dan Haloban (Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil, n.d.). Hasil wawancara dengan Amri di kesbangpol Aceh Singkil menyebutkan bahwa yang mendominasi penduduk Singkil adalah Suku Minang, dan Pakpak. Suku Minang ini kebetulan disebut sebagai Singkil Pesisir dan Pakpak disebut sebagai Singkil Hulu, namun kemudian daerah ini kedatangan suku-suku bangsa lainnya seperti Suku Aceh, Suku Jawa, Suku Alas, dan lain-lainnya.

Masyarakat Singkil kini merupakan masyarakat yang sangat plural karena terdiri dari berbagai macam suku bangsa mendiami wilayah ini. Secara sosiologis, masyarakat Singkil dapat dikelompokkan menurut stratanya sehingga tampak jelas bagaimana lapisan tersebut. Dalam stratifikasi sosial, kesalahan identifikasi dan interaksi berdasarkan strata dapat memunculkan konflik dalam masyarakat itu sendiri. Sehingga kemudian ada ranah yang tidak dapat dikelompokkan dalam stratifikasi sosial, yaitu diferensiasi sosial. Hal ini sangat sensitif bagi masyarakat, dengan munculnya istilah diferensiasi sosial harapannya semua pihak mampu memposisikan diri sehingga konflik komunal dapat dihindarkan.

Pandangan peneliti tertuju pada konsep stratifikasi dan diferensiasi itu sendiri sebagai sebuah norma dan nilai. Para sosiolog dan antropolog memisahkan kedua istilah itu, hal itu juga sudah berlaku dalam sebuah masyarakat dimanapun berada. Setelah stratifikasi dan diferensiasi, maka kemudian muncul turunan nilai dan norma berikutnya yang ada pada keduanya yang inti

dasarnya adalah harus saling menghargai dan menghormati jika ingin memperoleh keharmonisan dalam hidup bermasyarakat.

Masyarakat Singkil pada umumnya dan Suka Makmur khususnya, merupakan masyarakat yang multikultural dimana bukan hanya Suku Singkil saja yang eksis namun terdiri dari bermacam suku bangsa. Kondisi ini telah disadari sejak berpuluh tahun silam, bahkan ratusan tahun lalu dimana Belanda sebagai penguasa saat itu mendatangkan para pekerja dari luar daerah untuk keperluan perkebunannya. “Pada zaman penjajahan Belanda perkebunan memerlukan tenaga kerja, untuk itu Belanda mendatangkan tenaga kerja dari luar yang kebetulan beragama Kristen, sejak itulah ada masyarakat beragama Kristen di Singkil”. (Amri, 2022)(Harahap, 2018).

Dengan adanya perbedaan suku bangsa yang ada di Singkil menunjukkan banyaknya nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini didasarkan bahwa umumnya setiap suku bangsa memiliki nilai dan norma tersendiri, meskipun juga tidak dipungkiri sering memiliki kesamaan dengan suku bangsa lainnya. Pandangan ini merujuk pada bahwa perbedaan suku bangsa berarti adanya perbedaan budaya, dimana setiap budaya yang dimiliki suku bangsa terdiri dari unsur-unsur dan setiap unsur memiliki pondasi nilai dan norma tersendiri (Koentjaraningrat, 2009). Meski demikian, nilai dan norma dasar adalah saling menghargai dan menghormati sesama manusia. Demikian halnya pada masyarakat di daerah melting pot Singkil seperti Kecamatan Gunung Meriah, Suro, Simpang Kanan, dan Danau Paris. Suku bangsa boleh berbeda, agama pun boleh berbeda namun dalam kehidupan sehari-hari memiliki kesamaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian meski berbeda-beda masyarakat di tempat ini tetap rukun dan menjalani hidup bersama. Sebagaimana digambarkan Mardhiah di kantor Bakesbangpol Aceh Singkil.

“Masyarakat Singkil ini plural, banyak suku dan beragam agama. Namun dalam kehidupan sehari-hari mereka itu bersatu, rukun, dan tidak ada permasalahan. Belanja ke pasar sama-sama (bersama-sama), jika yang satu hajatan mengundang yang lainnya dan mereka yang diundang juga datang. Demikian pula nanti sebaliknya, jadi tidak ada permasalahan dalam kehidupan sehari-hari.” (Mardhiah, 2022).

Penjelasan Mardhiah ini sangat selaras dengan Amri selaku pelaksana tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Singkil. Beberapa referensi dari para peneliti juga menunjukkan kesamaan pernyataan tersebut, dimana hasil-hasil penelitian sebelumnya menunjukkan kondisi yang sangat apik dalam kehidupan sosial masyarakat pada masyarakat Singkil di melting pot tersebut. Kondisi yang masyarakat yang saling menghargai dan menghormati ini juga dapat kita

temukan dalam penelitian-penelitian, seperti hasil penelitian Kamaruddin dkk dari Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Muhajir Al Fairusy dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Hartani dan Nulhaqim dari Universitas Padjajaran, dan masih banyak peneliti yang membahas Singkil lainnya.

Pantauan dari Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Singkil juga menunjukkan kondisi yang sama dengan data-data yang dihimpun oleh kesbangpol Singkil sebagaimana dikatakan Mardhiah dan Amri. Tidak ada permasalahan serius dalam masyarakat yang plural tersebut. “Dalam kesehariannya, masyarakat hidup rukun tidak ada permasalahan apa-apa. Mereka menjalani hidup bersama-sama dan perbedaan yang ada seperti suku, dan agama bukan masalah. Bahkan mereka saling mengundang dan saling hadir pada setiap kenduri yang diselenggarakan warga masyarakat kedua belah pihak baik muslim atau kristen”. (Mustafa 2022).

Fakta lain menunjukkan bahwa masyarakat di melting pot juga terjadi goresan nilai-nilai yang selama ini menyatukan semua warga oleh karena tempat ibadah pada tahun 2015 yang lalu. Akan tetapi hal ini sudah sangat dipahami oleh semua pihak, bahkan oleh pemerintah daerah sendiri. Dikatakan sangat dipahami, karena sesungguhnya konflik yang muncul bukan secara tiba-tiba pada tahun tersebut, namun telah ada sejak tahun 1979.

Perbedaan suku dan agama di Singkil bahkan di dunia ini merupakan keniscayaan pada masyarakat yang multikultural, namun tindakan yang melewati batasan pastilah oleh karena penyebab yang luar biasa. Perkara yang paling mendasar adalah oleh karena kebutuhan umat akan tempat ibadahnya, dalam kajian sosiologi dan antropologi disebutkan bahwa komponen religi itu ada lima dan salah satunya adalah peralatan ritus dan upacara. Dalam hal ini yang dimaksud peralatan ritus dan upacara salah satunya adalah tempat untuk melaksanakan ibadah (Koentjaraningrat, 2010). Tempat ibadah ini menjadi permasalahan ketika ditengarai bahwa pendiriannya tidak sesuai dengan prosedur atau aturan yang telah ditetapkan, sedangkan secara konsensus juga telah dicapai pada kasus serupa yang terjadi sebelumnya.

Berdasarkan kasus yang ada, Mustafa memberikan gambaran utuh mengenai asal mula munculnya disharmonisasi antar warga masyarakat di melting pot khususnya di Suka Makmur. Mustafa juga memberikan jalan tengah demi tercapainya konsensus yang dapat memberikan kondisi aman, dan nyaman bagi seluruh warga masyarakat.

“Menurut saya saat ini harus duduk bersama untuk mendapatkan kesepakatan. Sepakati saja berapa diperlukan tempat ibadah sesuai dengan kebutuhan (bukan mengada-ada) yang riil. Karena umat Kristen ternyata memiliki banyak sekte yang memang tidak bisa dicampur

antar sekte itu. Namun, setelah disepakati tidak boleh dilanggar lagi (mengada-ada)". (Mustafa, 2022).

Gambaran di atas sangat jelas bahwa perbedaan suku bangsa itu sendiri sesungguhnya merupakan potensi munculnya konflik, namun juga potensi terbentuknya masyarakat yang terintegrasi. Potensi konfliknya terletak pada perbedaan budaya yang dijalankan masing-masing suku, dan potensi integrasi karena kesadarannya sebagai manusia yang saling membutuhkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gesekan antar umat beragama justru oleh karena implementasi qanun ini. Gesekan di Suka Makmur Singkil justru oleh karena protes sebelah pihak kepada pihak lainnya, dimana pendirian tempat ibadah tidak sesuai dengan aturan (qanun) yang berlaku. Pada sisi pihak yang lain, terdesak oleh karena kebutuhan tempat ibadah dimana hal itu menjadi hak setiap warga negara yang menjalankan kehidupan beragamanya. Namun, terhalang oleh ketidakmampuan memenuhi persyaratan oleh karena dalam membutuhkan tempat ibadah pada satu pihak tidak memerlukan jumlah pemakai. Sedangkan pada satu pihak sangat logis dengan memberlakukan jumlah pengguna tempat ibadah. Ketidakmampuan salah satu pihak dalam memenuhi persyaratan ini sebagaimana dikatakan oleh Mardhiah.

"Masyarakat sebelah ini kan mempertanyakan tentang ijin pendirian, sedangkan pihak lainnya tidak mampu memenuhi syaratnya. Ya...harusnya kalau tidak bisa memenuhi syaratnya jangan mendirikan tempat ibadah dong.., kan sudah diatur dalam qanun. Memang pihak ini juga menunjukkan bahwa tempat ibadah menurut undang-undang merupakan haknya, tetapi kan undang- undang ini sudah diturunkan di daerah dan sudah disahkan. Harus dihormati- lah.., meski demikian pemerintah tetap mengupayakan yang terbaik untuk semua pihak agar kehidupan tetap aman dan nyaman walaupun belum bisa dikatakan tuntas."(wawancara dengan Mardhiah 2022).

Pernyataan Mardhiah ini juga dikatakan oleh informan lainnya meskipun dalam penekanan yang berbeda-beda. Gesekan di Suka Makmur Singkil merupakan wujud implementasi kebijakan pemerintah yang tidak mulus di masyarakat. Masyarakat sangat memahami kebijakan ini, namun disisi yang lain salah satu pihak merasa tidak mampu menjalankan kebijakan tersebut oleh karena kebutuhan mendasar untuk melaksanakan ibadah. Bagi peneliti hal ini merupakan perbedaan tolak ukur mengenai penggunaan tempat ibadah antara pihak yang satu dengan pihak sebelah.

Sebagai tindak lanjut upaya pemerintah menjamin warga masyarakat tetap aman dan nyaman, telah melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Beberapa kali dilakukan pertemuan untuk mendapatkan kesepakatan antara berapa banyak tempat ibadah yang dapat diberikan ijin

sesuai kebutuhannya. Namun, setiap pertemuan selalu gagal mendapatkan kesepakatan, sehingga sampai saat ini stagnan.

“Sampai saat ini tidak dapat diperoleh kesepakatan tentang berapa tempat ibadah yang dibutuhkan umat Kristen. Umat Kristen tetap meminta 20-an gereja harus mendapatkan ijin, sementara jumlah umatnya tidak sebanding dengan kebutuhan gereja yang harus mendapatkan ijin. Umat Islam tidak keberatan jika semua syaratnya dapat dipenuhi. Bagi saya pribadi, untuk menyelesaikan kasus ini ambil saja kesepakatan saat ini berapa gereja dibutuhkan sesuai sekte-nya, namun berjanji nanti tidak ada penambahan lagi, mungkin ini bisa menyelesaikan permasalahan.” (Mustafa,2022)

Kegagalan mencapai konsensus dalam kasus ini memang memiliki kondisi yang sangat berbahaya, karena kasus ini bakal muncul kembali ketika ada hembusan angin yang menghasut kedua belah pihak. Merujuk pandangan Nasikun, mediasi yang tidak mencapai konsensus bisa ditempuh dengan cara terakhir yaitu arbitrase atau perwasitan (Nasikun, 2009). Kondisi perwasitan diatur oleh pihak ketiga seperti pemerintah atau lembaga lainnya yang diberikan hak untuk mengatur kedua belah pihak agar tetap kondusif. Pihak yang melanggar akan diberikan sanksi keras, tentu kondisi perwasitan harus diumumkan sehingga semua pihak dan masyarakat luas di daerah maupun nasional memahami kondisi keduabelah pihak yang tidak mencapai konsensus.

Penanganan kasus ini sekarang bukan saja menjadi ranah Pemkab Singkil tetapi juga sudah menjadi urusan Pemprov Aceh. Saat ini, pemerintah melalui aparatnya tetap waspada dan berjaga-jaga serta melakukan antisipasi munculnya gesekan baru akibat belum tercapainya konsensus pada peristiwa terakhir. Keputusan untuk tetap memantau dan waspada ini merupakan bagian dari bagaimana pemerintah menangani gesekan ini agar tidak terjadi lagi dan berkembang. Pada sisi yang lain pemerintah juga dituntut bekerja keras memantau sosial media yang sewaktu-waktu dibanjiri berita hoax terkait peristiwa yang terjadi. Bukan hanya memantau, namun pemerintah juga harus mampu melakukan pemblokiran media sosial maupun media massa yang berpotensi memperkeruh suasana.

KESIMPULAN

Berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan dan dilakukan analisis, maka akhirnya didapatkan simpulan Faktor-faktor yang membuattergoresnya hubungan antar warga masyarakat dan antar umat beragama di Suka Makmur, Aceh Singkil, dipicu oleh pendirian tempat ibadah yang tidak mendapatkan izin. Hal ini menimbulkan protes dari pihak yang merasa terganggu dan

meminta penertiban, namun karena tidak ada respons yang jelas dari pihak berwenang, mereka kemudian melakukan penertiban secara mandiri. Tindakan tersebut berujung pada bentrokan yang memperburuk hubungan antar warga.

Namun, di sisi lain, masyarakat Suka Makmur yang plural dapat tetap bersatu berkat adanya saling menghargai dan menghormati antar individu, serta adanya keterkaitan sosial melalui cross cutting affiliation. Meski ada perbedaan, ikatan sebagai sesama warga masyarakat mampu menjaga keharmonisan dan mengurangi potensi konflik, yang menjadi faktor utama dalam mempertahankan kesatuan di tengah keberagaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiyanti, Y. (2008). Focus group discussion (diskusi kelompok terfokus) sebagai metode pengumpulan data penelitian kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 12(1), 58–62.
- Armansyah, A., Taufik, M., & Damayanti, N. (2022). Dampak Migrasi Penduduk pada Akulturasi Budaya di Tengah Masyarakat. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi*, 6(1), 25–34.
- Diharjo, S. M. (2020). Dinamika perubahan sosial dalam teori konflik. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Bisnis*, 5(1).
- Fasya, T. K., Yunanda, R., & Fariadi, D. (2023). Depoliticization of the Uleebalangs Descendants Due to a History of Past Violent Conflicts. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 4(1), 102–111.
- Hanafi, I. (2018). Agama dalam Bayang-Bayang Fanatisme; Sebuah Upaya Mengelola Konflik Agama. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 10(1), 48–67.
- Harahap, S. (2018). Konflik etnis dan agama di indonesia. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)*, 1(2), 1–19.
- Hartani, M., & Nulhaqim, S. A. (2020). ANALISIS KONFLIK ANTAR UMAT BERAGAMA DI ACEH SINGKIL. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*.
<https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.28154>
- Humaedi, M. A. (2014). Kegagalan akulturasi budaya dan isu agama dalam konflik lampung. *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, 21(2), 149–162.
- Istiqomah, A., & Widiyanto, D. (2020). Resolusi konflik berbasis budaya Tionghoa-Jawa di Surakarta. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 17(1), 40–49.

- Koentjaraningrat, R. M. (1975). *Anthropology in Indonesia: a bibliographical review*.
- Moleong, L. J. (2019). Moleong, " Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi". Bandung : Remaja Rosdakarya. *PT. Remaja Rosda Karya*.
- Muttaqin, H. (2019). Urgensi rekonstruksi sosiologi bagi kajian cyber society. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(1), 105–129.
- Ritzer, G. (2012). Teori Sosiologi: Dari sosiologi klasik sampai perkembangan terakhir postmodern. In *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Setiawati, S. M. (2023). Rethinking of Local Election in The Unitary State: A Study Of Indonesia's Politics. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 4(1), 1–13.
- Subekti, S. (2019). Pengalaman Akulturasi dan Resolusi Konflik Warga Keturunan Tionghoa di Semarang. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 2(2), 111–118.
- Sugiono, P. D. (2014). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif.pdf. In *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.
- Trijono, L. (2009). Pembangunan Perdamaian Pasca-Konflik di Indonesia: Kaitan perdamaian, pembangunan dan demokrasi dalam pengembangan kelembagaan pasca-konflik. *JSP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 13(1).